

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN ORGANISASI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
1.	Iwan Herniwan, S.Si., MP. NIP. 19691106 199803 1 006 Kepala Bagian Program dan Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
2.	Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. NIP. 19670517 198803 1 001 Kepala bagian Pemantauan dan Evaluasi	
3.	Jhon Piter Halomoan Situmorang, Ak., M.Ak. NIP. 19670101 198703 1 001 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
4.	Moch. Zaini, SAP. NIP. 19600520 198502 1 001 Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
5.	Ir. Reflus, M.Si. NIP. 19580613 199403 1 001 Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
6.	Selamet Budiharto, Ak. NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
7.	Windy Dian Trisari, S.Psi NIP. 19810609 200312 2 001 Kepala Bagian Kepegawaian	

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
8.	Ir. M. Aris Supriyanto, M.T. NIP. 19701110 199603 1 003 Kepala Subdit Barang dan Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
9.	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Ak., M.M. NIP. 19670410 198703 2 001 Kepala Subdit Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
10	Erwin Sondang S, S.STP., M.Si. NIP. 19800614 199810 1 001 Kepala Subdit Badan Usaha dan Keadaan Khusus	
11.	Ir. Zulhenny, M.Dev Plg NIP. 19680309 199402 2 001 Kepala Subdit Iklim Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
12.	M. Iskandarsyah, S.Pi., M.Si. NIP. 19721227 200003 1 007 Kepala Subdit Perencanaan Pengadaan APBN	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
13.	Setyanto Putro, S.E. NIP. 19690118 199503 1 003 Kepala Subdit Monitoring dan Evaluasi	
14.	Ir. Hardi Afriansyah, M.Si. NIP. 19690421 200212 1 001 Kepala Subdit Riset dan Kontrak	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
15.	Drs. Dwi Satrianto NIP. 19651108 199703 1 001 Kepala Subdit Pengelolaan Katalog	
16.	Patria Susantosa, S.Si., M.Si. NIP. 19731201 200312 1 004 Kepala Subdit Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
17.	Dr. Hermawan, S.E., M.M. NIP. 19740720 199502 1 001 Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE	

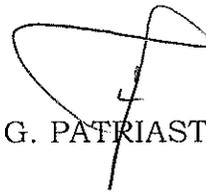
No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
18.	Ria Agustina Nasution, S.E., M.E. NIP. 19680829 199503 2 001 Kepala Subdit Standar Kompetensi dan Kelembagaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
19.	Ichwan Makmur Nasution, M.Sc. NIP. 19750625 200212 002 Kepala Subdit Program Pelatihan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
20.	Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. NIP. 19690813 199403 1 001 Kepala Subdit Sumberdaya Pembelajaran	
21.	Suharti, S.Psi., M.Si. NIP. 19730627 199803 2 002 Kepala Subdit Sistem dan Sarana Sertifikasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi
22.	Ir. Ida Poespita, M.Si. NIP. 19620810 199003 2 001 Kepala Subdit Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi	
23.	Mudjisantosa, S.E., M.M. NIP. 19680616 198901 1 001 Kepala Subdit Wilayah I Barat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
24.	Yulianto Prihandoyo, S.T., M.T. NIP. 19710731 199803 1 005 Kepala Subdit Wilayah I Timur	
25.	Ir. Irawaty Imran, M.T. NIP. 19600518 199603 2 001 Kepala Subdit Wilayah II Timur	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
26.	Eko Rinaldo Octavianus, S.E., M.E. NIP. 19691014 199603 1 001 Kepala Subdit Keterangan Ahli	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
27.	Fanni Sufiandi, S.T., M.T. NIP. 19750919 200502 1 003 Kepala Subdit Keterangan Ahli	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP
28.	Selamet Budiharto, Ak. NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pembangunan Data Center dan Perangkat Jaringan

KEDUA : PPK yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Mei 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,



IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Kepala LKPP ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ;
5. Direktur Jenderal Perendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Pejabat Eselon II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.